

Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Wandi Harmawan (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Rabina Yunus (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Murfhi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: wandiharmawan@yahoo.com

Abstract

This writing at analyzing the implementation effectiveness of Inspectorate Performance of Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan and to analyze factors that influence the supervision effectiveness of inspectorate performance of Kabupaten Pangkajene islands. This research is done by doing direct interview with competent and relevant informants. The result of this research shows that performance implementation done by the Inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands comprises investigation, examination and investigation functions are running well and this fact is strengthen by the achievement of the inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands to get (WTP) or Fair without Exception predicate for the second time.

Keywords: *inspectorate, effectiveness, controlling*

Abstrak

Tulisan ini menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengawasan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan. Hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini meliputi fungsi pemeriksaan, pengujian dan pengusutan sudah berjalan dengan baik dan diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang kedua kalinya.

Kata kunci: *inspektorat, efektivitas, pengawasan*

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan Pemerintahan. Penyelenggaran Pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya

penyampaian kebijakan Pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program Pemerintahan. Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan bagi masyarakat yang akan menunjang terciptanya aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat Pemerintah umumnya dan aparat Pemerintah daerah khususnya. Penyimpan-

gan penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat Pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh Pemerintah daerah itu sendiri.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.

Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang lainnya masih terkadang diremehkan. Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintahan daerah. Dimana salah satu hal yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua asas, yaitu: Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedang pengusutan dilakukan sendiri oleh Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sekretariat Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban

tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebut diatas, maka keberadaan Badan Pengawasan Daerah merupakan instansi vertikal dari Badan Pengawasan yang ditugaskan di Kabupaten sebagai aparat pengawasan umum, dimana dalam melakukan pengawasan tugas-tugas secara administratif maupun operasional diperlukan adanya mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Bupati dalam pelaksanaan pengawasan maupun kedudukannya sebagai instansi vertical yang bertanggungjawab kepada Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan Skripsi dengan judul "Analisis pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan"

METODE PENELITIAN

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Dasar penelitian yang menggunakan metode studi kasus (case study) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu proses tertentu terkait fokus penelitian ini. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Kantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adalah suatu badan instansi Pemerintah yang berada di daerah (Kabupat-

en) yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam hal ini bupati untuk menyelenggarakan Pemerintahan khususnya dibidang pengawasan.

Inspektorat Daerah ini di pimpin oleh seorang inspektur, didalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih maksimal, maka inspektur Kabupaten dibantu oleh 4 (empat) inspektur pembantu, yakni inspektur pembantu wilayah I, inspektur pembantu wilayah II, inspektur pembantu wilayah III, dan inspektur pembantu wilayah IV, Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sendiri bertempat di jalan H.M Arsyad B, kecamatan pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pelaksanaan fungsi Pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten pangkajene dan kepulauan. Dalam melakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka ruang lingkup dalam pemeriksaan akan ditekankan pada pengawasan aparatur Pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan, serta kesejahteraan sosial, adapun yang menjadi alasan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh keempat bidang Pemerintahan daerah (bidang aparatur, pembangunan, keuangan, dan bidang kesejahteraan sosial) dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas Pemerintahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penilaian efektivitas dalam melakukan pemeriksaan khususnya di kantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Dra. Rasmay Rahman selaku auditor Ahli madya yaitu sebagai berikut: "Pelaksanaan pemeriksaan dalam pelaksanaan pembangunan selama ini sudah terkoordinasi dengan baik, karena temuan yang kita temukan dilapangan kita bandingkan dengan data yang sudah ada se-

hingga kalau ada ketidakcocokan dengan data sebelumnya langsung dilakukan ditindak lanjut ditempat".(wawancara tanggal 8 juli 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Auditor ahli madya, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dalam bidang pembangunan sudah berjalan sebagaimana mestinya karena adanya data pembanding yang dijadikan sebagai acuan didalam melakukan pemeriksaan sehingga segala bentuk penyelewengan dapat ditekan, Selanjutnya wawancara dengan bapak Drs. Muh. Zukri selaku inspektur pembantu wilayah I sebagai berikut: "Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa sudah tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi ada beberapa daerah yang memang membutuhkan waktu dikarenakan jarak tempuh dan medan yang dilalui selain itu ada juga pihak-pihak yang seringkali tidak ada ditempat ketika akan dilakukan pemeriksaan"(wawancara tanggal 3 juli 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan inspektur pembantu wilayah I dikantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat disimpulkan bahwa didalam melakukan pemeriksaan pelaksanaan aktivitas Pemerintahan daerah sudah tepat waktu dan berdasarkan dari hasil wawancara dengan inspektur pembantu wilayah I ada beberapa wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memerlukan waktu yang lebih lama dikarenakan kondisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memang merupakan daerah kepulauan, selain itu cuaca buruk dan alat transportasi yang digunakan untuk sampai ditempat tujuan masih menggunakan perahu nelayan menjadi kendala Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didalam melakukan pemeriksaan dan sampai saat ini masih belum ada solusi yang tepat. Masih adanya pihak-pihak yang membandel ketika akan diperiksa juga

menjadi masalah yang sampai saat ini masih sering terjadi.

Selanjutnya mengenai system pemeriksaan dan pengawasan kinerja Inspektorat dari hasil wawancara dengan bapak Drs.H.M.Yasin, SH. MH selaku inspektur, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan atas fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten pangkajene dan kepulauan sudah transparan karena hasil temuan yang ada dilapangan sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh tim pemeriksa. Hal ini diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meraih WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk kedua kalinya. (wawancara tanggal 1 juli 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengenai sistem pemeriksaan, dalam melakukan pengawasan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah transparan dan sesuai prosedur, dengan alasan karena didalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah daerah, tingkat akurasi data yang didapat dilapangan sudah sesuai dengan rencana dan didalam melakukan pengawasan dan dapat dipertanggungjawabkan, adanya koordinasi yang baik membuat pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan fungsi Pengujian pada Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan yang dijalankan dikantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka penilaian berikutnya ialah efektivitas pengujian di dalam penerapan fungsi pengawasan khususnya pada kantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam hubungannya dengan uraian diatas akan disajikan hasil wawancara dengan ibu Dra. Rasmay Rahman selaku auditor ahli madya, beliau mengatakan bahwa: "Pelaksa-

naan pengujian yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena data /informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pedoman karena sudah melalui serangkaian proses pengujian" (wawancara tanggal 8 juli 2014).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pengujian dengan sejumlah informasi yang telah diperoleh dilapangan maka data yang didapatkan sudah akurat dan dapat dijadikan sebagai pedoman didalam melakukan pengujian yang valid. Kemudian wawancara dengan bapak Drs. Amirullah selaku inspektur pembantu wilayah III: "Pelaksanaan pengujian yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada".(wawancara tanggal 8 juli 2014).

Dari hasil wawancara dengan bapak inspektur pembantu wilayah III ini kemudian memperjelas kembali pendapat ibu Drs. Rasmay Rahman selaku auditor ahli madya bahwa pelaksanaan pengujian yang dilakukan sudah sesuai dengan data yang di dapat di lapangan dan kemudian dari data yang didapat kemudian di uji keaslian data yang disajikan. Beliau juga berpendapat bahwa kurangnya sumber daya manusia pada kantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi faktor penghambat didalam melakukan pengawasan akan tetapi menurut beliau faktor tersebut tidak menjadi alasan untuk Inspektorat tidak bekerja secara profesional. Beliau juga memaparkan bahwa didalam pelaksanaan pengujian ini tidak terlepas dari pada pihak-pihak selaku yang akan di periksa karena jika lihat dari kondisi saat ini dimana masih banyaknya pihak pihak yang membandel ketika akan diperiksa selin itu jika dilihat dari wilayah kabupaten pangkajene dan kepulauan yang bisa dikatakan cukup besar membuat proses pemeriksaan ini khususnya pengujian agak terlambat dari

pada jadwal yang telah ditentukan mengingat kondisi geografi kabupaten pangkajene dan kepulauan itu sendiri yang kita ketahui bersama jika pangkajene dan kepulauan sebagian besar wilayahnya adalah daerah kepulan, hal ini merupakan salah satu penghambat karena kita ketahui bersama kondisi alam saat ini yang tidak menentu, dan kendaraan yang digunakan ke daerah tersebut yang masih terbilang kurang layak karena masih menggunakan perahu nelayan setempat.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada yang kemudian dapat di pertanggungjawabkan keakuratan datanya.

Pelaksanaan fungsi Pengusutan pada Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Efektivitas pelaksanaan pengawasan selain daripada pemeriksaan dan pengujian, juga ditunjang oleh adanya pelaksanaan pengusutan. Oleh karena itu perlu ditunjang oleh adanya penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan kinerja Pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara dengan bapak Ir. A. Aryan Arief selaku sekretaris inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diuraikan sebagai berikut: "Salah satu misi dalam pengusutan adalah mempermudah untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengawasan atas informasi dari berbagai pihak "(wawancara tanggal 3 juli 2014).

Dari hasil wawancara dengan bapak Ir. A. Aryan Arief dikantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu tujuan yang dilakukan dalam melakukan pengusutan adalah untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan atas penyimpangan atau pen-

yalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengadaan atau informasi dari berbagai pihak. Kemudian dilihat dari berbagai hasil pemeriksaan mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan pengawasan maka akan di paparkan hasil wawancara dengan ibu Dra. Rasmy Rahman selaku Auditor Ahli Madya yang mengatakan bahwa: "Pelaksanaan pengusutan sudah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilaksanakan sebelumnya" (wawancara tanggal 8 juli 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor ahli madya dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengusutan sudah tepat waktu dan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, hal ini bisa tercapai karena informasi yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dan pengujian tidak lambat sehingga mempermudah dalam proses pengusutan. Berdasarkan dari hasil wawancara , maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengusutan sudah tepat waktu karena adanya koordinasi dan pengolahan data yang baik pula.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam Undang-undang. No. 22 tahun 2009 dan undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 11 tentang Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian aktivitas yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian pengusutan dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta badan usaha milik daerah serta usaha lainnya.

Perlu ditambahkan bahwa di dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah maka terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi Inspektorat di dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas fungsional, adapun faktor-faktor tersebut meliputi aparat pengawas serta sarana dan prasarana penunjang. Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas maka dari hasil wawancara dengan bapak Ir.A.Aryan Arief selaku sekretaris Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beliau mengatakan bahwa Kualitas suatu pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah sangat bergantung pada kompetensi daripada aparatur pengawas itu sendiri dan di samping itu didukung juga oleh sarana dan prasarana yang memadai didalam melakukan pengawasan. (wawancara 8 juli 2014).

Dari hasil wawancara dengan bapak sekretaris Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, kualitas aparatur pengawas serta sarana dan prasarana menjadi faktor penting di dalam menunjang kualitas pelaksanaan pengawasan yang baik. Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan ibu Dra. Rasmy Rahman selaku auditor ahli madya mengenai tanggung jawab aparat pengawas dikantor inspektorat Kabupaten pangkajene dan keupalaun sebagai berikut: "Didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas, aparat pengawasan dikantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah memiliki tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang dilakukan" (wawancara tanggal 8 juli).

Dari hasil wawancara yang diuraikan diatas maka dapat di simpulkan bahwa didalam melakukan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan, para aparatur Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagai pengawas. Kemudian dari hasil wawancara dengan sekretaris Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bapak Ir.A.Aryan Arief mengenai kelengkapan sara-

na dan prasarana dikantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beliau mengatakan bahwa: "Didalam penyelenggaraan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini sudah ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor, komputer dan alat penunjang lainnya yang mendukung pelaksanaan pengawasan meskipun masih ada yang perlu untuk dilengkapi". (wawancara tanggal 3 juli 2014). Dari hasil wawancara dengan bapak sekretaris maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dikantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didalam melakukan pengawasan sudah ditunjang oleh sarana dan prasarana pendukung misalnya saja alat tulis , komputer, dan lain sebagainya, meskipun masih ada kekurangan dan perlu untuk ditambahkan.

Dalam penelitian ini pembahasan di fokuskan pada penilaian efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dimana indikator dari pendapat yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto yang mengatakan bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karenanya, dalam pembahasan digunakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan, dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi titik pokok dalam pembahasan adalah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah yang selama ini dilakukan sudah efektif, dengan alasan karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja Pemerintahan daerah yang selama ini telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini

dapat dilihat dari ketepatan waktu pemeriksaan yang sudah tepat waktu meskipun untuk daerah-daerah tertentu masih ada keterlambatan seperti di daerah kepulauan yang dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor cuaca yang serigkali tidak mendukung dan juga sarana pendukung seperti transportasi yang digunakan masih terbilang tradisional, sehingga waktu yang ditempuh tidak bisa diperkirakan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan waktu yang ditempuh sehingga data yang ingin disampaikan untuk daerah-daerah kepulauan sehingga perlu diberikan solusi yang efektif sehingga dapat lebih meminimalisir lagi tingkat keterlambatan didalam pengumpulan data-data. Kemudian jika dilihat dari efektivitas pelaksanaan pengujian dari masing-masing bidang pengujian yang telah ditelusuri, sudah ditunjang dengan ketersediaan data yang akurat dan dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut, selain itu pengujian yang telah dilaksanakan sudah transparan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ada, hal ini ditunjang dengan keberhasilan Inspektorat Kabupaten pangkajene dan kepulauan untuk kedua kalinya meraih WTP (wajar tanpa pengecualian) sebagai wujud profesionalisme kerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya, dilihat dari segi efektivitas dalam pengusutan, dalam hal pengusutan dapat dilihat dari ketepatan waktu didalam melakukan penyelidikan dianggap sudah efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan dalam pengusutan ini ditunjang dengan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman di dalam melakukan pengusutan sudah tepat waktu, sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kemudian dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kelancaran fungsi

pengawasan Inspektorat khususnya inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini ialah dari segi kualitas sumber daya manusianya sehingga berdampak pada kinerja pengawasan yang lebih efektif dan efisien, hal ini ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, ditengah kuantitas para pengawas di kantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak menurunkan kualitas pengawasan inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kelancaran fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ialah sarana dan prasarana penunjang, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam beberapa hal, ternyata memiliki dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Akan tetapi terlepas dari itu semua, rasa tanggungjawab para pengawasan yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan sudah menggambarkan keberhasilan dalam hal pengawasan karena jika lihat dari ketepatan waktu dan keakuratan data yang di laporkan sudah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan atas hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah di paparkan sebelumnya, maka diapatlah beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan system pengawasan yang dilihat dari segi pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan sudah berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari segi ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan, serta keakuratan data yang dilaporkan Inspektorat Kabupaten Pang-

kajene dan Kepulauan dengan data yang ada dilapangan; 2) Faktor yang mem-pe-ngaruhi daripada pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah yang pertama yaitu dari segi aparatur pengawas, dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang ada dikantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi salah satu factor penghambat didalam melakukan pengawasan karena berdampak pada waktu penyelenggaraan pengawasan dan selain itu sarana dan prasaran menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi dari pada kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, masih kurangnya sarana dan prasarana memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelancaran dari suatu proses pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni Abdurrahmat, 2006, Organisasi dan Manajemen, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta
- Gie,The Liang. Adminidtrasi Perkantoran Moderen. Radya Indra, Yogyakarta : 1980
- H. B. Siswanto. 2005, Pengantar Manajemen, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- H. Inu Kencana Syafiie. 2003, Sistem Administrasi Negara, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Makmur. 2010, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Ndraha, Talidziduhu. 2002, Kyberology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru), PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Ndraha, Talidziduhu. 2002, Kyberology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru), PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2007, Pengawasan Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, FH UII PRESS.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, Dasar-dasar Manajemen, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, cetakan keempat, Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefulah, 2005, Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor 12 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.